REFERENSI

Buku

Adjie, Habib. *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Ahadirohman, Rinda. "Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertipikat Ganda Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh)." Tesis Magister, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, 2020.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Dewandaru, Prasetyo Aryo, Nanik Tri Hastuti, dan Fifiana Wisnaeni. "Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 156.

Fawdi, Maulana Ilhami. "Menteri ATR/BPN: Ada 48.000 Konflik Pertanahan di 2024, 79% Selesai." *Detik News*, 14 November 2024. Diakses 12 Desember 2025.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Edisi Revisi. Jakarta: Universitas Trisakti, 2018.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Kurniadi, Maxwell, Febby Mutiara Nelson, dan Pieter Everhardus Latumeten. "Kedudukan Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3540K/PDT/2019)." *Indonesian Notary*5, no. 3 (2024): 3.

Kurniawan, Indra, et al. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Pada Badan Pertanahan Nasional Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2024): 271.

Murad, Rusmadi. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 1991.

Nurhaliza, Siti. "Tanggung Jawab Administratif Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda Hak Milik." Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2023.

Nurlinda, Ida. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah di Indonesia: Pedoman bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Masyarakat*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Perangin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

Pratama, Aditya. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Akibat Terbitnya Sertipikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pdt/2016)." Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2021.

Rizky, Muhammad. "Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Mencegah Sengketa Sertipikat Ganda." Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2022.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Santoso, Urip. *Penyelesaian Sengketa Tanah: Perspektif Hukum Administrasi dan Perdata*. Jakarta: Kencana, 2019.

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Setiawan, S. "Perkara Sertipikat Ganda, Panti Asuhan Muhammadiyah di Bandung Jadi Sengketa." *Suara Merdeka*, 30 Maret 2022. Diakses 12 Desember 2025.

Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cetakan ke-10. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-21. Jakarta: Intermasa, 2005.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sutedi, Adrian. *Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ulil Albab Institute. "Tanggung Jawab PPAT Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah yang Menjadi Objek Sengketa Ditinjau dari PP Nomor 24 Tahun 1997." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 3751.

Virgin, Ocha, dan Rani Apriani. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Bersertipikat Ganda." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 9 (2024): 3585.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1054.

Wawancara

Dadang Abdul Haris Kosidin, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT di Kota Bandung, *Wawancara,* (31 Maret 2026).

Tuhu Endarto, A. Ptnh., M.M. Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung, *Wawancara,* (2 April 2026).